Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA PULAU TAMBAK KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Naila Rahma[1], Muhamad Arsyad[2], Yusran Fahmi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : nailarahma681@gmail.com

ABSTRAK

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan instrumen kebijakan sosial pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program BLT serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Pulau Tambak, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang terdiri dari aparat desa, ketua RT, penerima BLT, dan masyarakat non-penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program BLT di Desa Pulau Tambak masih cukup efektif, dengan temuan utama: (1) pemahaman program rendah akibat minimnya sosialisasi; (2) ketepatan sasaran relatif baik namun seleksi tidak transparan; (3) keterlambatan penyaluran bantuan hingga 2-3 bulan; (4) tujuan pengurangan kemiskinan belum tercapai; dan (5) tidak terjadi peningkatan taraf hidup penerima. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi pemerintah dan musyawarah desa, sementara faktor penghambat mencakup rendahnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran petugas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi program, transparansi seleksi penerima, dan pemberdayaan ekonomi penerima BLT untuk mencapai dampak berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Bantuan Langsung Tunai, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan Perdesaan, Kebijakan Sosial

ABSTRACT

The Direct Cash Assistance (BLT) program is a social policy instrument aimed at reducing poverty and improving community welfare, particularly in rural areas. This study aims to analyze the effectiveness of the BLT program and identify influencing factors in Pulau Tambak Village, Hulu Sungai Utara Regency. Using a qualitative approach with descriptive type, this research collected data through in-depth interviews, observation, and documentation involving 13 informants consisting of village officials, neighborhood heads, BLT recipients, and non-recipient community members. The findings reveal that the effectiveness of the BLT program in Pulau Tambak Village remains suboptimal, with key findings: (1) low program understanding due to minimal socialization; (2) relatively good targeting accuracy but non-transparent selection processes; (3) disbursement delays of up to 2-3 months; (4) poverty reduction objectives not achieved; and (5) no improvement in recipients' living standards. Supporting factors include government regulations and village deliberations, while inhibiting factors encompass low socialization, budget constraints, and lack of officer awareness. This research recommends strengthening program socialization, transparent recipient selection, and economic empowerment of BLT recipients to achieve sustainable impacts.

***Keywords**: Program Effectiveness, Direct Cash Assistance, Community Welfare, Rural Poverty, Social Policy*

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks administrasi publik, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Program ini dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban ekonomi kelompok rentan.

Kebijakan BLT memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mengatur bahwa BLT merupakan pemberian uang tunai langsung kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di desa. Keberadaan program ini menjadi semakin krusial mengingat masih tingginya angka kemiskinan di daerah perdesaan, di mana akses terhadap lapangan kerja dan pelayanan sosial masih terbatas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat lokal (Firdaus, 2022; Razi, 2022).

Meskipun BLT memiliki tujuan mulia, pelaksanaannya di berbagai daerah menghadapi beragam tantangan. Studi yang dilakukan oleh Amrizal *et. al.* (2018) mengidentifikasi bahwa efektivitas program bantuan sosial sering terkendala oleh masalah pemahaman program yang rendah di kalangan masyarakat, ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, dan minimnya perubahan nyata pada kondisi sosial ekonomi penerima. Fenomena serupa juga ditemukan di Desa Pulau Tambak, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana terdapat tiga masalah utama: pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme BLT karena tidak adanya sosialisasi dan media informasi yang memadai; kedua, masih banyak penerima yang tidak mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi setelah menerima bantuan dalam beberapa tahun; dan ketiga, keterlambatan penyaluran bantuan hingga tiga bulan di awal tahun akibat keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

Penelitian tentang efektivitas program BLT di tingkat desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Razi (2022) menemukan bahwa BLT Dana Desa di Desa Lambhuk, Banda Aceh, telah berjalan efektif dengan penerima tepat sasaran dan dampak positif yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, Firdaus (2022) menyimpulkan bahwa efektivitas BLT Dana Desa di Kecamatan Sungai Pandan, Hulu Sungai Utara, masih tergolong cukup efektif dengan beberapa indikator yang belum optimal, terutama pada aspek pemahaman program dan ketepatan waktu. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BLT sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas aparat desa, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Dalam kerangka teori administrasi publik, efektivitas program dapat diukur melalui berbagai indikator. Menurut Sutrisno dalam Amrizal *et. al.* (2018), efektivitas suatu program dapat dinilai dari lima dimensi utama: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pemahaman program merujuk pada kemampuan petugas dalam mensosialisasikan program kepada masyarakat; tepat sasaran berkaitan dengan ketepatan penerima manfaat; tepat waktu mengukur kedisiplinan dalam pelaksanaan; tercapainya tujuan menilai keberhasilan program mencapai target yang diharapkan; dan perubahan nyata mengamati transformasi kondisi sosial

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

ekonomi setelah program berjalan. Kelima dimensi ini saling terkait dan membentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan publik.

Selain itu, efektivitas program juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal organisasi. Muhyadi dalam Badu dan Djafri (2017) mengidentifikasi empat faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas: karakteristik organisasi yang mencakup struktur dan teknologi; karakteristik lingkungan yang menentukan interaksi organisasi dengan eksternal; karakteristik pekerja yang berkaitan dengan perilaku dan kompetensi sumber daya manusia; serta kebijakan dan praktik manajemen yang meliputi kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks program BLT di tingkat desa, keempat faktor ini menjadi penting untuk dipahami guna mengidentifikasi hambatan dan peluang peningkatan efektivitas program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pulau Tambak, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif (Ahmad, 2015; Anggara, 2015) untuk mengeksplorasi secara mendalam efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Pulau Tambak, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lokasi dipilih secara purposif berdasarkan fenomena rendahnya pemahaman masyarakat, ketidaktepatan waktu penyaluran, serta dampak program yang belum optimal. Data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dari dokumen dan arsip terkait (Sujarweni, 2020). Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program, melibatkan 13 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, tiga Ketua RT, tiga penerima BLT, dan tiga masyarakat non-penerima.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap mekanisme penyaluran dan kondisi sosial ekonomi, wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur, serta dokumentasi berupa peraturan, data penerima, arsip musyawarah desa, dan foto kegiatan. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan sementara dan verifikasi, serta penarikan kesimpulan akhir (Sujarweni, 2020). Kredibilitas data dijamin melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan metode, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta *member check* (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pemahaman Program

a. Adanya Sosialisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pulau Tambak berlangsung secara cukup efektif. Meskipun aparatur desa mengklaim telah melaksanakan sosialisasi melalui rapat internal yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan ketua RT, mayoritas informan dari kalangan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

penerima maupun masyarakat non-penerima secara konsisten menyatakan tidak pernah menerima sosialisasi langsung. Para ketua RT dan warga menegaskan bahwa informasi hanya beredar sebatas forum perangkat desa, tanpa penjelasan utuh kepada masyarakat sasaran, sehingga pemahaman warga terhadap mekanisme, tujuan, dan hakikat program BLT sangat rendah. Observasi mengonfirmasi absennya pemberitahuan resmi yang menjangkau seluruh lapisan warga.

Temuan ini kontras dengan indikator pemahaman program sebagai sub-variabel efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)). Dalam kerangka teori tersebut, efektivitas suatu program meniscayakan pemahaman publik yang terbangun melalui sosialisasi inklusif. Hasil penelitian justru memperlihatkan bahwa komunikasi yang bersifat hierarkis dan tertutup hanya terhenti pada rantai birokrasi desa tidak mampu menumbuhkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat penerima. Ketiadaan sosialisasi langsung menyebabkan indikator pemahaman tidak tercapai, sehingga klaim keberhasilan administratif kehilangan landasan substantifnya. Dengan demikian, secara empiris penelitian ini mempertegas bahwa dimensi pemahaman program dalam konstruk efektivitas sangat bergantung pada praktik sosialisasi yang partisipatif dan menjangkau langsung kelompok sasaran.

b. Informasi yang jelas

Hasil penelitian mengenai indikator kejelasan informasi menunjukkan ketidakefektifan komunikasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pulau Tambak. Aparatur desa menyatakan bahwa informasi telah disampaikan secara jelas dan berpedoman pada regulasi pemerintah, namun pengakuan tersebut bersifat kontradiktif dengan realitas di lapangan. Informasi yang menjangkau masyarakat hanya bersifat parsial, disalurkan secara lisan oleh petugas tanpa didukung materi pelengkap, serta tidak menjelaskan program secara utuh. Observasi memperkuat temuan ini dengan menunjukkan ketiadaan media informasi resmi seperti pamflet, brosur, maupun baliho, sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran lengkap, faktual, dan mudah dipahami tentang mekanisme maupun tujuan BLT.

Temuan ini mengkritisi operasionalisasi indikator kejelasan informasi dalam konstruk pemahaman program yang digagas Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)). Teori tersebut mensyaratkan bahwa informasi harus mudah dipahami, lengkap, tidak membingungkan, dan sesuai fakta agar publik dapat menangkap esensi program secara benar. Secara empiris, informasi yang disampaikan di Desa Pulau Tambak tidak memenuhi syarat kelengkapan dan kejelasan karena terhenti pada tataran administratif tanpa sosialisasi langsung yang menjangkau penerima. Klausa normatif tentang "informasi jelas" kehilangan daya operasionalnya ketika tidak ditransformasikan ke dalam tindakan komunikasi yang partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kejelasan informasi bukan sekadar klaim kepatuhan prosedural, melainkan suatu proses penyebaran yang sistematis, inklusif, dan terukur untuk menumbuhkan pemahaman substantif warga, sehingga memperkuat premis bahwa efektivitas program bergantung pada transmisi pengetahuan yang utuh.

c. Tingkat Pemahaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Pulau Tambak terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat rendah. Penerima bantuan hanya mengetahui bahwa mereka menerima uang tanpa mampu menjelaskan tujuan, syarat, maupun mekanisme program, sementara warga non-penerima tidak

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

memperoleh penjelasan sama sekali. Meskipun aparatur desa mengeklaim sebagian warga telah paham, data wawancara dan observasi menegaskan bahwa ketiadaan sosialisasi langsung mengakibatkan pemahaman yang parsial dan dangkal. Masyarakat tidak memiliki kemampuan menangkap makna substantif program, sehingga pengetahuan mereka hanya bersifat superfisial.

Secara teoretis, indikator tingkat pemahaman dalam sub-variabel pemahaman program yang digagas Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)) mensyaratkan kemampuan masyarakat untuk menjelaskan kembali, menerapkan, dan menafsirkan informasi yang diterima. Temuan empiris justru mengungkap bahwa pemahaman warga hanya berhenti pada tataran menerima dana tanpa interpretasi mendalam, sehingga memicu protes dan persepsi ketidakadilan akibat ketidaktahuan kategori penerima. Kegagalan ini membuktikan bahwa tanpa sosialisasi yang menyeluruh dan langsung menjangkau seluruh kelompok sasaran, indikator pemahaman tidak dapat tercapai. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa pencapaian dimensi pemahaman program dalam konstruk efektivitas sangat bergantung pada transmisi pengetahuan yang utuh, inklusif, dan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Tepat Sasaran

a. Ketepatan Penerima

Temuan penelitian mengenai indikator ketepatan penerima Program BLT di Desa Pulau Tambak menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Aparatur desa dan seluruh penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan telah disalurkan kepada individu yang memenuhi kriteria, dengan Kepala Desa mengestimasi ketepatan sasaran mencapai 95 persen. Observasi dan dokumentasi data penerima memperkuat klaim ini, mengonfirmasi bahwa penerima berasal dari kelompok kurang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, sejumlah warga non-penerima mengungkapkan adanya individu berkecukupan yang masih terdaftar serta warga miskin lain yang tidak terakomodasi akibat keterbatasan kuota penerima.

Secara teoretis, hasil ini selaras dengan sub-variabel tepat sasaran dalam konstruk efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)), yang menekankan distribusi program kepada kelompok target yang berhak. Mekanisme seleksi berbasis musyawarah desa mampu menghasilkan akurasi penerima yang tinggi, namun secara empiris menunjukkan bahwa dimensi tepat sasaran tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian kriteria individu. Keterbatasan kuota menimbulkan eksklusi yang memicu persepsi ketidakadilan di kalangan warga yang tidak terpilih, sehingga klaim akurasi administratif menjadi rentan secara sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa konstruk tepat sasaran perlu mengintegrasikan aspek kecukupan jangkauan alokasi, sehingga efektivitas program tidak sekadar akurat secara prosedural melainkan juga berkeadilan distributif.

b. Keterbukaan Seleksi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan seleksi Program BLT di Desa Pulau Tambak cukup efektif. Aparatur desa mengeklaim proses seleksi berlangsung transparan melalui musyawarah desa bersama RT dan BPD, namun mayoritas penerima dan warga non-penerima secara konsisten menyatakan tidak terdapat seleksi terbuka. Penerima mengaku langsung ditunjuk tanpa prosedur yang diketahui publik, sementara warga non-penerima menduga adanya favoritisme dan ketertutupan informasi. Observasi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengonfirmasi bahwa seleksi dilakukan secara tertutup oleh perangkat desa tanpa partisipasi masyarakat, sehingga prinsip transparansi tidak terwujud.

Temuan ini bertentangan dengan sub-variabel tepat sasaran dalam teori efektivitas Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)) yang mensyaratkan proses seleksi terbuka, jujur, dan dapat diakses publik sebagai fondasi ketepatan penerima. Mekanisme seleksi yang elitis dan tertutup hanya mengandalkan rantai birokrasi desa, mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi distribusi bantuan. Ketidaktransparanan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan legitimasi ketepatan sasaran meskipun secara administratif klaim akurasi tetap dipertahankan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konstruk tepat sasaran tidak hanya terukur dari kesesuaian kriteria penerima, melainkan juga menuntut proses seleksi yang partisipatif dan akuntabel secara publik.

c. Sesuai Tujuan Program

Temuan penelitian mengenai indikator kesesuaian tujuan program menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT di Desa Pulau Tambak cukup efektif. Seluruh aparatur desa, ketua RT, dan penerima manfaat menyatakan bahwa sasaran program telah sesuai dengan tujuan mensejahterakan warga kurang mampu. Namun, warga non-penerima mengungkapkan ketidaksesuaian karena adanya penerima yang dianggap masih mampu bekerja serta warga yang lebih membutuhkan justru tidak terakomodasi akibat keterbatasan kuota. Observasi peneliti mengonfirmasi bahwa meskipun seleksi dilakukan melalui musyawarah desa, distribusi penerima dinilai kurang tepat karena masih terdapat individu rentan yang tidak terpilih.

Secara teoretis, kondisi ini mengkritisi sub-variabel tepat sasaran yang digagas Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)), di mana kesesuaian tujuan program tidak hanya diukur dari ketepatan administratif penerima. Temuan memperlihatkan bahwa klaim keberhasilan tujuan melemah ketika alokasi sumber daya tidak mencakup seluruh populasi yang memenuhi kriteria, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan. Keterbatasan kuota menjadi variabel eksogen yang menggerus pencapaian tujuan substantif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa konstruk tepat sasaran harus mengintegrasikan dimensi kecukupan dan keadilan distribusi sebagai syarat mutlak agar tujuan program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran secara menyeluruh.

3. Tepat Waktu

a. Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Dengan Rencana

Hasil penelitian mengenai indikator kesesuaian waktu menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan BLT di Desa Pulau Tambak. Aparatur desa mengklaim jadwal penyaluran umumnya tepat, namun mengakui adanya keterlambatan awal akibat dana dari pemerintah belum cair. Para penerima manfaat secara tegas melaporkan penundaan pencairan selama dua hingga tiga bulan, sehingga realisasi tidak sesuai dengan rencana bulanan yang telah ditetapkan. Observasi lapangan memperkuat temuan ini dengan menunjukkan ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan aktual dan perencanaan awal.

Secara teoretis, kondisi ini bertentangan dengan sub-variabel Tepat Waktu dalam konstruk efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)), di mana ketepatan jadwal merupakan indikator penting keberhasilan program. Temuan membuktikan bahwa kegagalan memenuhi rencana waktu bersumber dari ketergantungan pada mekanisme pencairan dana pusat, sehingga dimensi tepat waktu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah desa. Hal ini mengungkap bahwa pengukuran

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

tepat waktu tidak hanya bertumpu pada aspek administratif lokal, melainkan memerlukan kepastian dan konsistensi rantai fiskal dari tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, secara empiris penelitian ini memperluas pemahaman bahwa efektivitas program berbasis jadwal sangat bergantung pada integrasi vertikal antartingkat pemerintahan dalam menjamin stabilitas penyaluran dana.

b. Selesai Tepat Waktu

Temuan penelitian pada indikator selesai tepat waktu menunjukkan cukup efektif pelaksanaan Program BLT di Desa Pulau Tambak. Seluruh perangkat desa, ketua RT, dan penerima manfaat secara konsisten menyatakan bahwa proses pengambilan bantuan berlangsung sesuai jadwal dan tidak pernah mengalami penundaan. Penerima mengonfirmasi bahwa setelah mendapat pemberitahuan, mereka langsung mengambil bantuan tanpa keterlambatan, kecuali terdapat kendala individual seperti sakit yang masih dapat diakomodasi keesokan harinya. Observasi peneliti memperkuat temuan ini dengan mencatat ketepatan waktu pengambilan oleh masyarakat penerima.

Secara teoretis, hasil ini selaras dengan sub-variabel Tepat Waktu dalam konstruk efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)), di mana penyelesaian kegiatan sesuai jadwal merupakan indikator keberhasilan. Konsistensi antara rencana dan realisasi pengambilan bantuan membuktikan bahwa dimensi tepat waktu dapat tercapai pada tahap distribusi akhir ketika komunikasi antara aparatur dan penerima berjalan cukup efektif. Kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan menunjukkan adanya kedisiplinan dan tanggung jawab pelaksana, sekaligus mengindikasikan bahwa kendala pencairan dana dari pusat tidak menghambat proses eksekusi lokal. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sub-variabel tepat waktu secara empiris terwujud melalui sinergi antara kepastian jadwal distribusi dan responsivitas penerima program.

4. Tercapai Tujuan

a. Jumlah Sasaran Terlayani

Temuan pada indikator jumlah sasaran terlayani menunjukkan cukup efektif meskipun aparatur desa dan ketua RT mengklaim seluruh kuota penerima telah terlayani. Penerima manfaat mengaku terlayani walau pemahaman terhadap program minim, sementara warga non-penerima secara kritis mengungkapkan masih terdapat individu yang memenuhi kriteria namun tidak terakomodasi akibat keterbatasan kuota. Observasi mengonfirmasi bahwa cakupan sasaran belum menjangkau seluruh warga miskin yang berhak, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam distribusi.

Temuan ini kontras dengan sub-variabel Tercapainya Tujuan yang digagas Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)), di mana seluruh kelompok target seharusnya terlayani secara proporsional. Adanya kesenjangan antara penerima riil dan warga miskin lain yang tidak terakomodasi membuktikan bahwa klaim keterlayanan formal tidak mencerminkan capaian tujuan substantif program. Ketidakmampuan kuota menyerap semua individu yang memenuhi syarat melemahkan dimensi pencapaian tujuan. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa konstruk tercapainya tujuan tidak cukup diukur dari pemenuhan kuota administratif, melainkan menuntut jangkauan yang adekuat agar seluruh populasi sasaran yang berhak benar-benar merasakan manfaat program.

b. Berkurangnya Kemiskinan

Hasil penelitian pada indikator berkurangnya kemiskinan menunjukkan ketidakefektifan substansial Program BLT di Desa Pulau Tambak. Seluruh aparatur desa,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

ketua RT, penerima manfaat, dan warga non-penerima secara seragam menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak mengurangi kemiskinan, melainkan hanya memberikan rasa terbantu sesaat. Data dokumentasi mengungkapkan peningkatan jumlah penerima dari 21 menjadi 24 orang, yang justru mengindikasikan stagnasi atau perluasan kemiskinan, bukan penurunannya.

Secara teoretis, temuan ini mengkritisi sub-variabel Tercapainya Tujuan yang digagas Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)), di mana efektivitas program diukur dari kemampuannya mencapai dampak akhir. Program BLT hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi konsumtif jangka pendek, tanpa kapasitas transformatif untuk mengentaskan kemiskinan secara struktural. Ketidakmampuan mengurangi jumlah warga miskin, yang justru bertambah, menegaskan bahwa tujuan substantif program tidak tercapai meskipun distribusi bantuan berjalan. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa konstruk tercapainya tujuan harus dievaluasi berdasarkan perubahan indikator kesejahteraan riil, bukan sekadar realisasi administratif penyaluran bantuan.

5. Perubahan Nyata

a. Peningkatan Taraf Hidup

Temuan pada indikator peningkatan taraf hidup menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan Program BLT di Desa Pulau Tambak. Seluruh aparatur desa, ketua RT, penerima manfaat, dan warga non-penerima secara konsisten menyatakan bahwa tidak terjadi peningkatan taraf hidup. Bantuan hanya berfungsi memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari secara pas-pasan tanpa menghasilkan perubahan kualitas hidup yang berarti. Jumlah penerima justru bertambah, mengindikasikan bahwa program tidak mendorong graduasi kemiskinan, melainkan memperluas ketergantungan.

Secara teoretis, hasil ini bertentangan dengan sub-variabel Perubahan Nyata yang dikemukakan Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)), di mana efektivitas program diukur dari kemampuannya menghasilkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi penerima. BLT hanya memberikan efek proteksi sesaat tanpa menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketidakmampuan memutus rantai kemiskinan menegaskan bahwa indikator perubahan nyata tidak terpenuhi. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa konstruk perubahan nyata meniscayakan dampak transformatif yang terukur, bukan sekadar bantuan tunai yang menopang subsistensi tanpa mengubah struktur kerentanan masyarakat miskin.

b. Kepuasan

Hasil penelitian pada indikator kepuasan menunjukkan cukup efektif yang bersifat parsial. Penerima manfaat BLT secara seragam mengungkapkan rasa puas karena memperoleh bantuan tunai, sementara warga non-penerima mengekspresikan ketidakpuasan akibat menilai sasaran program tidak tepat; masih terdapat individu yang dinilai lebih layak namun tidak terakomodasi karena keterbatasan kuota. Kesenjangan persepsi ini menandakan bahwa kepuasan belum tercipta secara merata di kalangan masyarakat Desa Pulau Tambak.

Secara teoretis, temuan ini mengkritisi sub-variabel Perubahan Nyata yang digagas Sutrisno (dalam Amrizal *et al.* (2018)). Kepuasan sebagai dimensi perubahan nyata tidak cukup diukur dari gratifikasi individual penerima, melainkan harus mencakup persepsi keadilan dari seluruh komunitas. Ketidakpuasan kelompok non-penerima yang dipicu oleh ketidaktepatan sasaran membuktikan bahwa perubahan nyata belum terwujud secara inklusif. Dengan demikian, secara empiris penelitian ini menegaskan bahwa konstruk

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

perubahan nyata mensyaratkan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan berkeadilan agar kepuasan memperoleh legitimasi sosial, bukan sekadar manfaat personal bagi segelintir penerima.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program BLT di Desa Pulau Tambak, yang dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama adalah adanya peraturan pemerintah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program BLT. Aparat desa mengikuti peraturan dari pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kriteria penerima dan mekanisme penyaluran BLT. Hal ini memberikan kepastian hukum dan panduan operasional bagi aparat desa dalam melaksanakan program. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Desa, "kami mengikuti peraturan dari pemerintahan tentang ketepatan sasaran penerima bantuan langsung tunai". Keberadaan peraturan ini juga membantu aparat desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima, meskipun dalam praktiknya masih ada kendala dalam implementasi. Faktor ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya kejelasan regulasi sebagai prasyarat keberhasilan implementasi.

Faktor pendukung kedua adalah adanya musyawarah desa yang melibatkan aparat desa, BPD, dan ketua RT dalam pemilihan penerima BLT. Proses musyawarah ini memungkinkan terjadinya diskusi dan pertimbangan kolektif dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata bersifat individual atau subjektif. Ketua RT memiliki peran penting dalam mengusulkan calon penerima dari wilayahnya karena mereka dianggap paling mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya. Musyawarah desa juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penentuan penerima. Dalam perspektif teori governance, musyawarah desa merupakan bentuk partisipasi publik dan pengambilan keputusan kolektif yang menjadi ciri khas demokrasi lokal di Indonesia(Sutoro, 2015).

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pertama adalah tidak adanya sosialisasi yang diadakan petugas untuk masyarakat. Minimnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang program BLT, yang pada gilirannya menimbulkan kesalahpahaman, prasangka, dan konflik sosial di tingkat lokal. Masyarakat tidak mengetahui kriteria penerima, mekanisme seleksi, dan prosedur pengaduan jika terjadi masalah. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi antara aparat desa dengan masyarakat, yang dalam literatur administrasi publik disebut sebagai information asymmetry, yaitu kondisi di mana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada pihak lain sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan.

Faktor penghambat kedua adalah kurangnya kesadaran petugas BLT untuk memberikan penjelasan informasi tentang program. Aparat desa hanya menyediakan informasi melalui lisan dan tidak menyediakan media informasi tertulis seperti brosur, pamplet, atau baliho. Mereka juga tidak memanfaatkan teknologi informasi seperti WhatsApp atau media sosial lainnya untuk menyebarkan informasi tentang BLT. Padahal, dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi saluran efektif untuk menjangkau masyarakat luas dengan biaya yang relatif murah. Kurangnya inisiatif aparat desa dalam menyediakan akses informasi ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan hak masyarakat

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

untuk mendapatkan informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Faktor penghambat ketiga adalah adanya perubahan pagu Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT di tahun-tahun mendatang. Aparat desa menginformasikan bahwa akan terjadi pengurangan kuota penerima BLT pada tahun 2027 karena adanya penurunan pagu Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT. Hal ini akan memaksa pemerintah desa untuk mengeluarkan beberapa penerima dari daftar penerima BLT, meskipun mereka masih dalam kondisi miskin dan membutuhkan bantuan. Perubahan kebijakan ini menjadi faktor penghambat karena menciptakan ketidakpastian bagi penerima dan akan menimbulkan gejolak sosial ketika pengurangan kuota benar-benar dilakukan. Dalam perspektif kebijakan publik, ketidakstabilan kebijakan dan perubahan alokasi anggaran yang tidak konsisten dapat menggagalkan upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Faktor penghambat keempat adalah adanya keterlambatan penerima program BLT dalam menerima bantuan, terutama di awal tahun akibat anggaran dari pemerintah pusat yang terlambat cair. Keterlambatan ini menyebabkan penerima tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tepat waktu, sehingga mengurangi efektivitas program dalam memberikan perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlambatan ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-programnya. Secara struktural, keterlambatan penyaluran anggaran ini merupakan masalah sistemik dalam pengelolaan keuangan negara yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan prosedur birokrasi yang kompleks. Menurut teori implementasi kebijakan, koordinasi antar tingkat pemerintahan dan kesederhanaan prosedur administrasi merupakan faktor kunci untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pulau Tambak, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara keseluruhan masih cukup efektif. Dari dua belas indikator efektivitas yang dianalisis, hanya satu indikator yang efektif (ketepatan penerima), sementara sebelas indikator lainnya masih kurang efektif dan. Rendahnya efektivitas program ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya sosialisasi program, rendahnya transparansi seleksi penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, belum tercapainya tujuan pengurangan kemiskinan, dan tidak adanya perubahan nyata pada taraf hidup penerima.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program BLT di Desa Pulau Tambak terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya peraturan pemerintah yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan adanya musyawarah desa yang melibatkan aparat desa, BPD, dan ketua RT dalam pemilihan penerima. Sementara faktor penghambat mencakup tidak adanya sosialisasi yang diadakan petugas untuk masyarakat, kurangnya kesadaran petugas untuk memberikan penjelasan informasi tentang BLT, perubahan pagu Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT di tahun mendatang, dan adanya keterlambatan penerima program dalam menerima bantuan akibat keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

Esensi temuan penelitian ini adalah bahwa program bantuan sosial berbasis tunai seperti BLT memiliki keterbatasan dalam mengatasi kemiskinan jika tidak disertai dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. BLT hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang membantu masyarakat miskin bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk mengangkat mereka dari kemiskinan secara permanen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

holistik yang menggabungkan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan modal sosial masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya tata kelola program yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagai prasyarat efektivitas kebijakan sosial di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu desa dengan pendekatan kualitatif, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif di beberapa desa dengan karakteristik berbeda, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih presisi efektivitas program BLT, serta meneliti dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan masyarakat dan mobilitas sosial ekonomi. Meskipun demikian, penelitian ini telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam memahami dinamika implementasi kebijakan sosial di tingkat desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, J. (2015) *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Amrizal, D., Dalimunthe, M.A. and Yusriati (2018) *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.

Anggara, S. (2015) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Badu, S.Q. and Djafri, N. (2017) *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Firdaus, M.Y. (2022) 'Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kecamatan Sungai Pandan (Studi Kasus di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Desa Sungai Pandan Hilir)'.

Razi, M.A. (2022) 'Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dalam Perspektif Maslahah Dharuriyah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)'.

Sugiyono (2017) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V.W. (2020) *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sutoro, E. (2015) *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.